

# **RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)**

**POLITEKNIK PARIWISATA BALI  
TAHUN 2020 - 2024**



**Disusun dalam rangka mewujudkan  
Poltekpar Bali Bali menjadi perguruan tinggi di bidang  
kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan  
berkepribadian Indonesia**

**POLITEKNIK PARIWISATA BALI  
2020**



# POLITEKNIK PARIWISATA BALI

Jln. Dharmawangsa  
Kampial, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan  
PO Box 2 Nusa Dua 80363

Telp. (0361) 773537 – 773538  
774818 – 774819  
Fax. (0361) 774821

e-mail : info@ppb.ac.id  
Website : http://www.ppb.ac.id  
Koord. GPS : 115<sup>o</sup> 11.539' BT. 08<sup>o</sup> 48.842' LS

## SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI

**NOMOR: SK.47/KP.006/PPB/I/2020**

### TENTANG

### RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK PARIWISATA BALI TAHUN 2020 – 2024

#### DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI,

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan Statuta Politeknik Pariwisata Bali (Poltekpar Bali Bali) sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang kepariwisataan di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
  - Bahwa program Poltekpar Bali semakin berkembang, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dipandang perlu adanya acuan atau pedoman yang bisa dipergunakan oleh civitas akademika Poltekpar Bali dalam pelaksanaan program pembelajaran di lingkungan Poltekpar Bali;
  - bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Poltekpar Bali secara berhasil guna dan berdaya guna perlu ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan atau dasar pijakan bagi manajemen sebagai lembaga eksekutif dalam mewujudkan visi lembaga yang tertuang dalam beberapa misi yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali.

5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BALI TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK PARIWISATA BALI TAHUN 2020 - 2024;**

**PERTAMA** : Program dan proses pembelajaran, kegiatan administrasi kantor dan pengembangan tenaga kependidikan dan dosen di lingkungan Politeknik Pariwisata Bali dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Pariwisata Bali;

**KEDUA** : Seluruh sivitas akademika di lingkungan Politeknik Pariwisata Bali wajib menggunakan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

**KETIGA** : Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Pariwisata Bali ditetapkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ditetapkan di : Nusa Dua  
Pada tanggal : 31 Januari 2020  
Direktur Politeknik Pariwisata Bali



**Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.**  
NIP. 19641026 199003 1 001

LAMPIRAN Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Bali  
Nomor : SK.47/KP.006/PPB/I/2020  
Tanggal : 31 Januari 2020

**RENCANA STRATEGIS  
POLITEKNIK PARIWISATA BALI  
2020 – 2024**

---

## **1. RINGKASAN EKSEKUTIF**

Rencana Strategis ini disusun sebagai *road map* dari perjalanan Politeknik Pariwisata Bali (Poltekpar Bali) tahun 2020 – 2024. Dalam Rencana Strategis ini dimuat: Pendahuluan, latar belakang pemikiran, landasan hukum, isu strategis, permasalahan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi dasar, strategi pencapaian, sasaran dan program lengkap dengan *baseline*.

Hasil analisis isu strategis menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tinggi harus membangun mutu yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global dengan membangun kompetensi mahasiswa yang mandiri sebagai wirausahawan dan mampu menjawab tantangan global terkait dengan isu lingkungan, kemanusiaan, dan keberlanjutan dalam mengelola usaha kepariwisataan. Oleh karena itu Poltekpar Bali mengantisipasi dengan membangun tata kelola yang baik dan sistem penjaminan mutu dengan meningkatkan peranan satuan pengawasan dan pengendalian internal sehingga akreditasi eksternal BAN-PT dan TedQual dapat menunjukkan nilai yang baik. Dengan tonggak sebagai pusat unggulan pendidikan tinggi kepariwisataan di ASEAN, Poltekpar Bali berfokus untuk menghasilkan lulusan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, diakui dan dipakai sebagai rujukan di tingkat regional ASEAN.

Indikator pusat unggulan di tingkat ASEAN dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai dengan kapasitas Poltekpar Bali dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Indikator unggul bidang pendidikan adalah terwujudnya lulusan berkualitas yang terserap bekerja di negara-negara ASEAN dan 10% mampu sebagai pengusaha yang menciptakan lapangan kerja. Indikator unggul bidang penelitian adalah para dosen dapat berkiprah sebagai pembicara pertemuan ilmiah di tingkat ASEAN dan dapat mengisi jurnal-jurnal internasional. Sedangkan indikator unggul bidang pengabdian kepada masyarakat adalah menghasilkan produk wisata yang dijadikan rujukan di tingkat ASEAN seperti desa wisata binaan Poltekpar Bali. Dalam hal tata kelola, Poltekpar Bali unggul dalam pengelolaan sistem pendidikan yang tersertifikasi ISO 9001:2015 dan TedQual.

## 2. PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan pendidikan, lembaga pendidikan tinggi dihadapkan pada perubahan lingkungan, baik eksternal maupun internal. Perubahan lingkungan eksternal yang meliputi aspek politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya dan teknologi memberikan dampak besar pada lembaga pendidikan tinggi dalam menjalankan peran dan fungsi serta pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perubahan-perubahan lingkungan eksternal ini tidak mudah untuk diprediksi dan dikendalikan oleh organisasi pendidikan tinggi. Lingkungan internal organisasi pendidikan tinggi yang umumnya merupakan sumber daya organisasi juga mengalami perubahan baik dalam kuantitas maupun kualitas. Meskipun perubahan-perubahan ini masih bisa dikendalikan oleh organisasi, namun tetap tidak mudah untuk disesuaikan mengikuti kebutuhan organisasi.

Politeknik Pariwisata Bali (Poltekpar Bali) sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi bidang pariwisata juga dihadapkan pada perubahan-perubahan lingkungan tsb. Poltekpar Bali dituntut untuk mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam rangka menentukan langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis diperlukan untuk dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan dan sasaran Poltekpar Bali, dan merespon kebutuhan pasar.

Dalam 5 Tahun terakhir setidaknya terdapat 4 peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaruh besar terhadap arah pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Peraturan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa pendidikan tinggi dalam fungsinya harus dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dankooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 telah menetapkan sebuah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 memuat amanat bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengikuti standar nasional yang telah ditetapkan baik standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.

Mengkristalisasi amanat dari keempat peraturan perundangan-undangan tersebut di atas dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang pariwisata di Poltekpar Bali maka dapat disampaikan beberapa hal antara lain, **pertama**, Poltekpar Bali dalam fungsinya menyiapkan sumber daya manusia pariwisata hendaknya mampu menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif. Dengan kemampuan dan kompetensi dimaksud maka sumber daya manusia pariwisata Indonesia akan dapat menjadi aset nasional yang memiliki daya saing internasional. **Kedua**, bahwa skema penyelenggaraan pendidikan tinggi pariwisata di Poltekpar Bali hendaknya dapat memberikan ruang bagi penyandingan, penyetaraan dan pengintegrasian capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal dan/atau pengalaman kerja. Hal ini sejalan dengan kondisi dimana masih banyaknya tenaga kerja pariwisata yang telah bekerja di industri pariwisata dan hospitaliti dalam jangka waktu yang relatif lama tetapi tidak memiliki latar belakang pendidikan formal sesuai bidangnya. Para tenaga kerja ini memerlukan pengakuan formal atas kompetensi atau capaian pembelajar yang telah dimiliki. **Ketiga**, dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi pariwisata di Poltekpar Bali hendaknya didasarkan atas kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan yang secara nasional berupa Standar Nasional Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Poltekpar Bali dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi pariwisata harus didukung oleh standar minimal yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar kompetensi isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran serta standar pembiayaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi, Poltekpar Bali juga harus mengikuti Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

Perubahan global (*global change*) dan pasar bebas tetap menjadi isu sentral yang tidak dapat dihindari dalam pembangunan negara-negara di dunia. Perkembangan teknologi informasi yang tanpa batas dan dikeluarkannya berbagai perjanjian terkait pasar bebas melalui *World Trade Organization* (WTO) membawa banyak dampak bagi sebuah kawasan dan masyarakat penghuninya. Liberalisasi 12 sektor jasa seperti dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan sepanjang hayat, dan lain-lain yang menjadi

agenda WTO melalui apa yang disebut dengan *General Agreement on Trade in Services (GATS)* (Effendi, 2007). Selain itu dalam lingkup ASEAN telah disepakati adanya AFTA (*Asean Free Trade Agreement*) yang merupakan bagian dari agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *Asean Economics Community* yang telah berlaku secara mutlak mulai tahun 2015. Tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program **Kampus Merdeka**, program kampus merdeka ini mencakup (1) Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi yang menjelaskan bahwa Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan, (2) Hak Belajar Tiga Semester di Luar Prodi dimana Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS dan ditambah mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Program Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan, (3) Pembukaan Prodi Baru diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities*. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan, (4) Kemudahan Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) dimana Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Tidak hanya itu tetapi Dunia Internasional saat ini juga sedang dilanda wabah virus Corona atau lebih dikenal Covid-19 yang menyebabkan penurunan pada sektor pariwisata. Hal ini juga secara otomatis akan membawa dampak pada Poltekpar Bali dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang pariwisata dan hospitaliti. Kompetisi yang terjadi pada tingkat internasional dan regional mengharuskan Poltekpar Bali menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menghadapi dampak dari arus globalisasi, pasar bebas dan virus corona tersebut

### **3. LATAR BELAKANG PEMIKIRAN**

Dalam mewujudkan Poltekpar Bali sebagai pusat unggulan (*centre of excellent*) dibidang pendidikan hospitaliti dan kepariwisataan, diperlukan adanya perhatian yang sangat besar terhadap tantangan global dan berbagai aspek legal yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta beberapa kebijakan dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Rencana Strategis Poltekpar Bali Tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan kebijakan dasar Poltekpar Bali yang terdiri atas tiga komponen, yaitu : 1) bidang

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2) bidang umum, kepegawaian, dan administrasi keuangan, dan 3) bidang kemahasiswaan, alumni, dan etika.

Berdasarkan pemikiran di atas, penting bagi Poltekpar Bali untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan Poltekpar Bali. Langkah-langkah strategis dimaksud akan termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024. Renstra 2020 – 2024 diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan integral kepada berbagai pihak terkait mengenai berbagai kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengkajian bidang pariwisata dan hospitaliti serta pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan adanya kesamaan pemahaman, yang kemudian dapat mencapai keserasian kebijakan dan langkah. Melalui Renstra 2020 – 2024 juga diharapkan Poltekpar Bali akan menjadi tempat belajar dan bekerja yang kondusif, yang dikelola dengan manajemen organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan taat asas.

#### **4. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis 2020 – 2024 didasarkan landasan-landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;



11. Peraturan Menteri Pariwisata No 13 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Bali; dan
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Bali.

## **5. ISU STRATEGIS**

Isu strategis yang berkembang dalam perkembangan global:

### **A. Internasional**

Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Namun, pada kenyataannya globalisasi merupakan penyatuan semu, karena nilai-nilai ekonomi, sosial, dan budaya didominasi nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi masyarakat dunia.

Globalisasi sering diterjemahkan “mendunia”. Suatu entitas, betapapun, dimanapun, kapanpun, dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia, baik berupa ide, gagasan, data, informasi, produksi, pembangunan, pemberontakan, dan sebagainya, begitu disampaikan, saat itu pula diketahui oleh semua orang di dunia.

Kekuatan globalisasi menurut analisis para ahli pada umumnya bertumpu pada 4 kekuatan global, yaitu: 1. Kemajuan iptek terutama dalam bidang informasi dan inovasi-inovasi baru di dalam teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. 2. Perdagangan bebas yang ditunjang oleh kemajuan iptek. 3. Kerjasama regional dan internasional yang telah menyatukan kehidupan bersama dari bangsa-bangsa tanpa mengenal batas negara. 4. Meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia serta kewajiban manusia di dalam kehidupan bersama, dan sejalan dengan itu semakin meningkatnya kesadaran bersama dalam alam demokrasi.

Kemajuan iptek yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Sebagai contoh, berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta membuka program kelas internasional. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Inilah yang dimaksud dengan globalisasi pendidikan.

Globalisasi pendidikan akan menuntut Poltekpar Bali mempunyai kecepatan mengakses informasi, menyesuaikan struktur dan sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, menciptakan manusia yang professional yang berstandar internasional, berkualitas dan mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Pada bulan Mei tahun 2020 UNWTO memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara akan terjadi penurunan antara 60 – 80% akibat adanya Covid-19. Penurunan

pariwisata global mempengaruhi perekonomian nasional, mata pencaharian masyarakat, dan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

## 2. Regional

Pada tingkat regional ASEAN, *Asean Free Trade Area* (AFTA) dan *Asean Economic Community* (AEC) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi isu yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. AFTA merupakan kerjasama antar Negara-Negara ASEAN dalam usaha untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN sebagai akibat dari pergeseran sistem ekonomi internasional yang menimbulkan dampak besar bagi dinamika hubungan perdagangan antar Negara. Dengan diberlakukannya AFTA maka hanya ada satu pasar dan basis produksi di kawasan ASEAN. AFTA telah dilakukan secara bertahap mulai KTT ASEAN di Singapura pada tahun 1992.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 merupakan realisasi pasar bebas (AFTA). Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa adanya aliran bebas bagi negara-negara ASEAN, dengan lima elemen utama yaitu aliran bebas arus jasa, arus investasi, arus tenaga kerja terampil, dan arus bebas modal. Hal-hal tersebut tentunya dapat berakibat positif atau negatif bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi dan langkah-langkah yang tepat agar Indonesia siap dan dapat memanfaatkan momentum terkait dengan pemberlakuan MEA.

Langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dapat berupa langkah strategis dalam sektor tenaga kerja, sektor infrastruktur, dan sektor industri. Dalam menghadapi MEA, Pemerintah Indonesia menyiapkan respon kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan Industri Nasional, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Logistik, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Perdagangan ([www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)). Selain hal tersebut masing-masing Kementrian dan Lembaga berusaha mengantisipasi MEA dengan langkah-langkah strategis. Dalam bidang pendidikan, Pemerintah dapat melakukan pengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan MEA. Pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas menjadi jawaban terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Oleh karena itu meningkatkan standar mutu pendidikan menjadi keharusan agar lulusannya siap menghadapi persaingan, termasuk lulusan lembaga pendidikan tinggi pariwisata seperti Poltekpar Bali.

Perguruan Tinggi tidak hanya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku lainnya dalam penyelenggaraan perguruan tinggi tetapi juga mampu mewujudkan

keunggulan akademik yang dapat dikontribusikan pada pembangunan lokal, nasional dan internasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut negara-negara anggota ASEAN diharapkan menghimpun diri dengan tujuan untuk membangun jejaring penjaminan mutu untuk mencapai dan menjaga standar kualitas yang tinggi bagi penyelenggara pendidikan tinggi. Untuk itu perguruan tinggi di ASEAN membentuk ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN) yang bertujuan untuk membangun kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi bersama-sama. Hal ini dilakukan karena isu globalisasi dan tuntutan kualitas pendidikan. Disamping itu juga, ada kebutuhan yang sangat tinggi untuk melakukan kolaborasi untuk bersinergi untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama. Lebih jauh lagi hal ini dilakukan untuk melakukan aliansi regional (ASEAN) sehingga dapat memiliki posisi tawar yang lebih bagus di level internasional. Semua itu bermuara pada harmonisasi pendidikan tinggi di kawasan ASEAN.

Untuk mengukur level Poltekpar Bali dalam hal kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat ASEAN maka Poltekpar Bali harus mendapat pengakuan dalam bentuk akreditasi dari AUN.

### **3. Nasional**

Perguruan tinggi memiliki peran sangat strategis bagi masyarakat yang sering dirumuskan dalam tiga wacana besar, yaitu universitas pengajaran (*teaching universities*), universitas riset (*research universities*) dan benteng peradaban (*bastion of civilization*). Ketiga peran tersebut secara tradisional tersirat dalam semangat Tridharma Perguruan Tinggi di Indonesia. Melalui Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi mempunyai peran yang amat besar dalam keseluruhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 20 ayat 2). Melalui Dharma Pendidikan, Perguruan Tinggi harus mampu memberdayakan proses pendidikan yang sedemikian rupa agar seluruh mahasiswanya berkembang menjadi lulusan sebagai sumber daya manusia berkualitas yang memiliki kompetensi paripurna secara intelektual, profesional, sosial, moral dan personal. Dharma kedua yaitu Penelitian, perguruan tinggi harus mampu mewujudkan institusi ilmiah akademik yang dapat menghasilkan berbagai temuan inovatif melalui kegiatan-kegiatan penelitian. Melalui penelitian perguruan tinggi dapat mengembangkan dirinya serta memberikan sumbangan nyata bagi pengembangan bidang keilmuan dan aplikasi dalam berbagai upaya pembaharuan. Selanjutnya melalui

Dharma ketiga yaitu Pengabdian, keberadaan perguruan tinggi harus dapat dirasakan manfaatnya bagi kemajuan masyarakat.

Dinamika inovasi baru dan proses globalisasi di segala bidang telah menyebabkan pihak manajemen perguruan tinggi mengalami perkembangan pesat yang tidak saja bersifat siklikal, tetapi juga struktural. Hampir semua perguruan tinggi di setiap negara berupaya untuk menyesuaikan diri (manajemen perguruan tinggi) dengan dinamika globalisasi tersebut yang bercirikan ketidakpastian yang terus berkembang dan persaingan pasar yang semakin ketat. Sejalan dengan hal tersebut, perguruan tinggi perlu melakukan perubahan tentang bagaimana konsep menata manajemen perguruan tinggi, baik pada tataran strategis maupun operasional dalam menghadapi tantangan global. Arah dan tujuan perguruan tinggi perlu juga disesuaikan dalam aspek kuantitas dan kualitas yang akan tercermin dari kemampuan para alumninya dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di sekitar tempat mereka bekerja. Untuk meningkatkan kualitas output lulusan, perguruan tinggi perlu meningkatkan efektifitas kerjasama sinergis antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri secara seimbang dengan memperhatikan keseimbangan peran universitas dalam hal pendidikan dan penelitian, terutama apabila perguruan tinggi difokuskan pada bidang penelitian (*research based university*).

Sebagai dharma pendidikan yang kedua, penelitian diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi. Kegiatan penelitian memerlukan adanya tenaga-tenaga ahli yang dihasilkan melalui proses pendidikan. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan sebagai hasil pendidikan dan penelitian hendaknya diterapkan melalui pengabdian kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dan menikmati kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kegiatan penelitian dan pengembangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kewirausahaan.

Dalam upaya menanggulangi atau menekan kenaikan jumlah pengangguran terdidik, perguruan tinggi (PT) dan dunia pendidikan dituntut mengubah paradigma melalui dharma pendidikan, dari yang semula lebih menekankan pada aspek kecerdasan konseptual (kognitif) hingga menjadi penanaman jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*). Wirausahawan, menurut Ciputra sebagai seorang wirausahawan sukses, adalah seseorang yang mampu mengubah kotoran dan sampah menjadi emas. Kompetensi kewirausahaan ini baginya bukanlah ilmu magic yang tidak bisa dipelajari, akan tetapi lembaga pendidikan adalah tempat paling efektif untuk melakukan proses pembelajaran kewirausahaan. Terdapat tiga ciri pembeda seorang wirausahawan, yaitu (a) mampu menciptakan kesempatan (*opportunity creator*), (b) mampu menciptakan hal-hal atau ide-ide baru yang orisinal

(*innovator*), dan (c) berani mengambil resiko dan mampu memperhitungkannya (*calculated risk taker*).

Secara empiris hal ini dapat diyakini dari berbagai penelitian oleh para ahli yang menunjukkan bahwa keberhasilan mahasiswa bukan ditentukan oleh kepandaian, tetapi oleh faktor lainnya yang sangat penting. Tingkat kecerdasan hanya menyumbang sekitar 20%-30%, sementara jiwa kewirausahaan yang didukung kecerdasan sosial justru memberikan sumbangan sebesar 80% terhadap keberhasilan mahasiswa dan bahkan kemajuan bangsa di kemudian hari. Menurut McClelland (1961) dalam bukunya *The Achieving Society*, untuk menjadi negara maju dan makmur, minimal jumlah wirausaha yang dibutuhkan adalah 2% dari total jumlah penduduk. Sebagai ilustrasi, Amerika Serikat pada tahun 2007 memiliki 11,5% entrepreneur, Singapura pada tahun 2005 memiliki 7,2 % entrepreneur, sedangkan Indonesia hanya memiliki 0,18% entrepreneur. Data menunjukkan bahwa 1 dari 12 orang Amerika terlibat langsung dalam kegiatan *entrepreneur*.

Keberhasilan implementasi kewirausahaan yang penting dicontoh adalah apa yang terjadi pada salah satu perguruan tinggi di Amerika, yaitu MIT (Massachusetts Institute Technology). Dalam kurun waktu tahun 1980-1996 ditengah pengangguran terdidik yang semakin meluas dan kondisi ekonomi, sosial politik yang kurang stabil, MIT merubah arah kebijakan perguruan tingginya dari *high Learning Institute and Research University* menjadi *Entrepreneurial University*. Meskipun banyak terjadi pro kontra terhadap kebijakan tersebut, namun selama kurun waktu di atas 16 tahun tersebut, para alumni MIT mampu melahirkan 4.000 perusahaan yang menyedot 1.1 juta tenaga kerja dengan omset sebesar 232 miliar dolar per tahun. Kebijakan ini terbukti dapat merubah kondisi Amerika menjadi Negara adi jaya (*super power*).

Beberapa perguruan tinggi dan lembaga pendidikan sejenis yang peduli akan urgensi kewirausahaan telah memulai bagaimana menjadikan kewirausahaan sebagai suatu budaya yang menginternal dalam perguruan tinggi dan segenap civitas akademika, terutama mahasiswanya. Hal ini dimaksudkan agar orientasi lulusan tidak lagi semata-mata mencari pekerjaan (*job seeker*), tetapi menciptakan lapangan pekerjaan (*job creator*).

Sebagai salah satu mediator dan fasilitator terdepan dalam membangun generasi muda bangsa, Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban dalam mendidik, melatih dan memotivasi mahasiswanya sehingga menjadi generasi cerdas yang mandiri, kreatif, inovatif dan mampu menciptakan berbagai peluang pekerjaan/usaha. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap perguruan tinggi semestinya segera merubah arah kebijakan manajemen dan paradigmanya (*paradigm change*) dari *high learning university and research university* menjadi *entrepreneurial university*, atau menyeimbangkan kedua arah kebijakan tersebut sehingga arah kebijakan keduanya tercapai baik yang bersifat *high learning university and*

*research university* maupun yang bersifat *entrepreneurial university*. Perubahan arah kebijakan dan paradigma tersebut diharapkan akan melahirkan *entrepreneur-entrepreneur* muda yang sukses.

Wisatawan domestik merupakan pasar pariwisata yang sangat potensial dan besar. Hal ini dapat terlihat pada jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2019 mencapai lebih dari 275 juta (sumber: Publikasi Statistik Wisatawan Nusantara 2019). Jumlah kunjungan ini tercapai karena Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2019 tumbuh sebesar 5,07 persen dibandingkan dengan tahun 2018.

Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia mencapai 22 persen hingga tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,02 persen. Pertumbuhan kelas menengah mempengaruhi perubahan gaya hidup masyarakat, pola produksi dan pola konsumsi. Informasi pariwisata semakin mudah diperoleh karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Perkembangan transportasi nasional pada tahun 2019 naik 11% dibandingkan tahun 2018. Keberadaan fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjang daya tarik dan ditingkatkannya kualitas fasilitas akomodasi daerah serta transportasi lokal. Adanya kemas paket dengan atraksi wisata yang menarik serta hari libur nasional/ganda/weekend. Bila pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami peningkatan, maka pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan domestik bisa mencapai lebih dari 300 juta kunjungan.

Untuk menjamin mutu pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka seluruh perguruan tinggi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Jadi SNPT dijadikan acuan dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, penjaminan mutu dan tata kelola lembaga. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas (1) standar kompetensi lulusan; (2) standar isi pembelajaran; (3) standar proses pembelajaran; (4) standar penilaian pembelajaran; (5) standar dosen dan tenaga kependidikan; (6) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (7) standar pengelolaan pembelajaran; dan (8) pembiayaan pembelajaran. Kedelapan standar tersebut menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum. Oleh karena itu semua proses bisnis dalam penyelenggaraan PT minimal harus mengacu pada ketentuan dalam SNPT. Referensi: (*Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada berbagai kesempatan di media cetak dan elektronik menyatakan bahwa target kunjungan wisatawan ke Indonesia pada 2020 sebanyak 17 juta orang optimis dapat dicapai. Strategi yang akan

diterapkan untuk mencapai target tersebut adalah dengan focus. Strategi ini berfokus pada wisatawan dengan pangsa pasar (market share) relatif besar ; 59,55 %, terhadap pasar yang lain mencakup Singapura, Malaysia, Australia, Tiongkok. Secara kewilayahan strategi yang diterapkan untuk jangka pendek adalah the 3 greats yaitu the great Batam, the great Jakarta, dan the great Bali.

Dalam jangka panjang, sampai dengan 2020; akan dikembangkan menjadi the 10 greats mencakup The great Batam, Sumatera, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Papua. Strategi tersebut dijalankan dengan mengadakan kerjasama dan dukungan lintas sektoral untuk sarana dan prasarana pariwisata. Mengutip data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, target kunjungan wisatawan sampai dengan 2020 sebesar 17 juta wisatawan.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja sektor pariwisata akan terus meningkat dengan kebutuhan kompetensi yang meningkat pula sesuai dengan harapan wisatawan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Poltekpar Bali terus meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru sehingga jumlah lulusan akan terus meningkat. Disamping itu, Poltekpar Bali memfasilitasi dirinya dengan LSPP1 untuk memastikan lulusannya kompeten dan dilengkapi dengan sertifikat kompetensi.

## 6. PERMASALAHAN STRATEGIS

Dengan melakukan analisis komprehensif faktor internal dan eksternal ditemukan permasalahan strategis di lingkungan Poltekpar Bali mencakup aspek Tata kelola, Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Fasilitas, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu :

- a. Pada aspek **Tata Kelola** ditemukan bahwa belum dimiliki Rencana Induk Pengembangan yang holistik mencakup pengembangan fisik mencakup sarana dan prasarana pembelajaran serta non fisik mencakup software pembelajaran yang futuristic. Di sisi lain, Poltekpar Bali sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadapi organizational inertia, artinya sangat lamban dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi utamanya pada adaptasi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku seperti pada analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk setiap jabatan yang ada. Kelambanan ini pada sisi lain karena sebagai UPT akan tergantung pada Organisasi Induk, Kementerian Pariwisata yang telah beberapa kali mengalami perubahan tata nama (nomenklatur) pada struktur organisasinya.
- b. Masalah strategis pada aspek **SDM** terutama mencakup kaderisasi tenaga fungsional dosen. Kaderisasi dosen belum terpola sehingga terjadi gap kualitas

dosen untuk substansi vokasi. Dampak dari gap ini bermuara pada tidak adanya road map jangka panjang untuk pengembangan karir dosen. Di sisi tenaga kependidikan yang merupakan unsur penting, juga belum direncanakan pola pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis yang berkelanjutan untuk menunjang mutu kerja pada jabatannya masing-masing.

- c. Pada aspek **keuangan** masalah strategis yang dihadapi oleh Poltekpar Bali adalah belum adanya fungsi atau jabatan khusus yang merencanakan dan memonitor realisasi anggaran. Kondisi ini berdampak pada tingkat penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan target pada setiap kwartal tahun berjalan sehingga pelaksanaan penyerapan anggaran terakumulasi pada kwartal terakhir tahun anggaran berjalan. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) belum dilaksanakan dengan optimal yang berdampak pada risiko kesalahan pelaporan penyerapan anggaran.
- d. **Fasilitas** pembelajaran bagi mahasiswa belum terkoneksi perpustakaan kampus dengan e-journal dan e-book yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen untuk sumber belajar yang mutakhir. Untuk kenyamanan suasana belajar pemeliharaan sarana pembelajaran belum dilakukan pemeliharaan yang optimal dan belum ada perencanaan pemeliharaan untuk jangka waktu setahun bersifat berkesinambungan. Kemajuan teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran di lingkungan Poltekpar Bali masih terhambat karena dibatasi oleh kapasitas *bandwidth* yang tidak memadai.
- e. **Pendidikan**  
Permasalahan strategis bidang pendidikan diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan *input*, proses dan *output*. Untuk bisa menemukannya permasalahan strategis, maka dilakukan analisis dengan benchmark Akreditasi BAN-PT, SNPT, reformasi birokrasi, ISO 9001:2008 dan TedQual serta ASEAN University Network (AUN). Permasalahan strategis bidang pendidikan adalah:
  - 1) Kualitas dan kuantitas calon mahasiswa masih belum memadai
  - 2) Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan masih belum sepenuhnya sesuai dengan bidang ilmu prodi.
  - 3) Kualitas fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung lainnya perlu ditingkatkan, dan belum dipelihara dan dimanfaatkan dengan optimal
  - 4) Kualitas pembelajaran belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan mahasiswa dan pencapaian Capaian Pembelajaran (CP)
  - 5) Kurikulum perlu diperbaiki agar relevan dengan kebutuhan industri masa kini dan masa depan



- 6) Peningkatan diri secara berkesinambungan yang berorientasi pada kebutuhan dari semua pemangku kepentingan belum membudaya
- 7) Belum optimalnya kualitas lulusan yang sesuai dengan CP dan dapat bekerja sesuai dengan profil lulusannya.

**f. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)**

Perguruan tinggi merupakan salah satu subsistem pendidikan nasional. Keberadaannya dalam kehidupan bangsa dan negara mempunyai peran penting dan strategis melalui penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2). penelitian atau riset ilmiah yang nantinya diharapkan menghasilkan temuan-temuan ilmiah untuk memperbaharui keilmuan itu sendiri. Jadi pada prinsipnya melakukan riset atau penelitian ilmiah ditujukan untuk pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat. Ilmu yang mereka kuasai melalalui proses pendidikan di perguruan tinggi harus diimplementasikan dan diterapkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Akan tetapi, pada kenyataannya Poltekpar Bali dirasakan belum menunjukkan kinerja yang maksimum apalagi menjadi pusat unggulan dalam kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini disadari terkait dengan beberapa faktor atau kendala yang terlihat pada beberapa gejala berikut:

- 1) Belum optimalnya pengakuan industri dan pemerintah terhadap hasil penelitian
- 2) Kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM dinilai masih rendah
- 3) Lemahnya motivasi dan kompetensi peneliti sehingga berpengaruh terhadap rendahnya budaya ilmiah
- 4) Belum berkembangnya kemitraan dengan lembaga terkait baik nasional maupun internasional
- 5) Kurangnya desiminasi dan publikasi hasil-hasil penelitian melalui seminar dan publikasi ilmiah
- 6) Belum adanya *road map* penelitian dan PkM sebagai acuan pengembangan kegiatan
- 7) Kurangnya penerapan hasil penelitian di industri dan masyarakat
- 8) Belum tersedianya TIK yang memadai yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi dan sekaligus media publikasi penelitian dan PkM.

#### **g. Penjaminan Mutu**

Permasalahan strategis bidang penjaminan mutu Poltekpar Bali diidentifikasi dengan menggunakan benchmark Akreditasi BAN-PT, SNPT, reformasi birokrasi, ISO 9001:2008 dan TedQual serta ASEAN University Network (AUN). Untuk itu, maka ditetapkan dua permasalahan strategis penjaminan mutu:

- 1) Prodi dan institusi belum mendapatkan akreditasi AUN
- 2) Belum terimplementasinya semua standar sistem manajemen mutu sesuai reformasi birokrasi, BAN-PT, SNPT, ISO 9001:2008, dan TedQual karena belum terbangunnya budaya mutu.

#### **7. VISI**

Visi Poltekpar Bali adalah menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia.

#### **8. MISI**

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional.
- b. Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatan dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- c. Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

#### **9. TUJUAN**

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional dan berjiwa wirausaha di bidang kepariwisataan.
- b. Menghasilkan penelitian dan karya terapan yang dimanfaatkan oleh masyarakat nasional dan internasional.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
- d. Menjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah, nasional dan internasional.
- e. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik.

## 10. SASARAN STRATEGIS

Untuk menutupi masalah-masalah strategis yang dibahas pada halaman sebelumnya sasaran strategis yang disasar oleh Poltekpar Bali sebagai berikut:

- a. Tersedianya Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang holistik mencakup pengembangan fisik sarana dan prasana pembelajaran serta non-fisik mencakup *software* pembelajaran yang futuristik. Di sisi lain, Poltekpar Bali sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus selalu mengikuti perubahan peraturan perundangan yang berlaku pada sektor pariwisata dan pendidikan. Hal ini harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga segera dapat dilaksanakan peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Pada pengembangan dosen agar disiapkan *roadmap* pengembangan dosen. Dengan *roadmap* ini akan terjadi estafet dan pengalihan pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya akan mempertahankan standar mutu pendidikan yang dilaksanakan. Juga, dengan *roadmap* yang disiapkan untuk jangka panjang dapat dipetakan tingkat kebutuhan dosen dengan latar pendidikan yang memadai untuk setiap program studi di lingkungan Poltekpar Bali.
- c. Pada aspek keuangan Poltekpar Bali harus memiliki PNS yang berfungsi khusus untuk perencanaan keuangan dengan tugas menyiapkan sampai dengan memonitor penyerapan anggaran tahun berjalan. Pelaksanaan SPIP harus dilaksanakan untuk menanggulangi risiko keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan penyerapan anggaran.
- d. Terwujudnya fasilitas pembelajaran yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif.
- e. Pendidikan

Sasaran strategis bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas *input*, proses dan *output*. Benchmark bidang pendidikan Poltekpar Bali adalah Akreditasi BAN-PT, SNPT, reformasi birokrasi, ISO 9001:2008 dan TedQual serta ASEAN University Network (AUN). Sasaran strategis bidang pendidikan adalah:

- 1) Terwujudnya calon mahasiswa yang berkualitas
- 2) Terwujudnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
- 3) Terwujudnya kualitas fasilitas pembelajaran dan fasilitas pendukung lainnya
- 4) Terwujudnya kualitas pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan mahasiswa dan pencapaian CP
- 5) Terwujudnya kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini dan masa depan

- 6) Terwujudnya peningkatan diri secara berkesinambungan yang berorientasi pada masukan dari semua pemangku kepentingan
- 7) Terwujudnya kualitas lulusan yang sesuai dengan CP dan dapat bekerja sesuai dengan profil lulusannya.

f. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Perguruan tinggi memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan-perubahan suatu masyarakat. Peran dan fungsi perguruan tinggi dapat diwujudkan dalam bentuk gerakan pembelajaran masyarakat untuk mendorong terciptanya transformasi sosial dan terjaganya nilai-nilai budaya bangsa. Perguruan tinggi juga dapat mengembangkan model pembangunan yang berbasis pada keilmuan dan sumberdaya lokal, membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (industri) dan dinamika perubahan global, dan membantu pengembangan kebijakan strategis eksekutif serta mengontrol implementasinya.

Secara spesifik, beberapa sasaran strategis yang diupayakan untuk diwujudkan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Poltekpar Bali antara lain adalah:

- 1) Meningkatnya pengakuan industri dan pemerintah terhadap bidang penelitian
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM
- 3) Terjadinya peningkatan motivasi dan kompetensi peneliti sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya budaya ilmiah
- 4) Terjalinnnya kemitraan dengan lembaga terkait baik nasional maupun internasional
- 5) Meningkatnya jumlah desiminasi dan publikasi hasil-hasil penelitian melalui seminar dan publikasi ilmiah
- 6) Tersusunnya *road map* penelitian dan PkM
- 7) Meningkatnya penerapan hasil penelitian oleh industri dan masyarakat local
- 8) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan TIK sebagai sumber materi dan publikasi hasil penelitian dan PkM

g. Penjaminan Mutu

Sasaran strategi bidang penjaminan mutu Poltekpar Bali berorientasi pada akuntabilitas internal dan eksternal. Disamping itu juga penjaminan mutu juga dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan pada tingkat nasional dan internasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka penjaminan mutu diarahkan untuk mengikuti

ketentuan nasional dan internasional yang sudah diperoleh dan yang akan diprogramkan dalam lima tahun kedepan. Benchmark penjaminan mutu Poltekipar Bali adalah Akreditasi BAN-PT, SNPT, reformasi birokrasi, ISO 9001:2008 dan TedQual serta ASEAN University Network (AUN). Untuk itu, maka ditetapkan dua sasaran strategis penjaminan mutu:

- 1) Mendapatkan akreditasi AUN
- 2) Menjaga mutu tata kelola sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi, BAN-PT, SNPT, ISO 9001:2008, dan TedQual.

## 11. STRATEGI DASAR

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas, capaian Renstra tahun 2020, dan arah pengembangan POLTEKIPAR BALI, ditetapkan strategi dasar Poltekipar Bali jangka waktu 2020 – 2024 :

- a. Melakukan penyusunan Rencana Operasional (Renop) dan konsolidasi internal melalui sosialisasi serta implementasi kebijakan dan peraturan secara intensif dan konsisten
- b. Memberdayakan program studi dalam proses penjaminan mutu, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, serta pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai tenaga yang profesional.
- c. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional.

## 12. STRATEGI PENCAPAIAN

- a. Tata kelola
  - 1) Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP)
  - 2) Melaksanakan percepatan Adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan
  - 3) Menyesuaikan nomenklatur struktur organisasi agar sesuai dengan perubahan
  - 4) Melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja.
- b. SDM
  - 1) Melaksanakan Kaderisasi dan Regenerasi dosen yang optimal
  - 2) Menyusun *road map* pengembangan dosen.
  - 3) Melaksanakan program-program pengembangan disiplin ilmu dosen tertentu belum sesuai kebutuhan (linieritas keilmuan, kualifikasi vokasi)
  - 4) Menyusun pola pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan dan melaksanakannya secara berkelanjutan

c. Keuangan

- 1) Melaksanakan perencanaan keuangan dan anggaran secara komprehensif dengan cermat melalui activity based budgeting
- 2) Mengimplementasikan SPIP secara sistemik dan berkelanjutan
- 3) Melaksanakan Monev penyerapan anggaran secara sistematis dan berkelanjutan

d. Fasilitas

- 1) Mengoptimalkan implementasi pemeliharaan dan pengendalian sarana dan prasarana
- 2) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi (e.g. wifi, aplikasi/software, penggunaan website/SIMAK, pemutakhiran laboratorium )
- 3) Melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas (pengkayaan) sarana dan sumber pembelajaran

e. Pendidikan

Strategi pencapaian dari sasaran strategis ditetapkan secara bertahap tiap tahun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahapan pertama (2020-2021) adalah tahapan penyusunan semua instrumen penjaminan mutu bidang pendidikan dan implementasinya. Instrumen penjaminan mutu meliputi penetapan sasaran mutu; pengorganisasian; penetapan instrumen seleksi PENSISBA; asesmen formatif dan sumatif; TOR semua kegiatan, validasi instrumen, penetapan SOP, dan panduan evaluasi dan pelaporan serta rencana induk pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Implementasi penjaminan mutu bidang pendidikan meliputi pencatatan implementasi, monitoring dan evaluasi melalui kegiatan rapat-rapat, inspeksi, evaluasi, dan tindak lanjut berkesinambungan.
- 2) Tahapan kedua (2022-2023) adalah tahap pengembangan yang meliputi pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan; pengembangan fasilitas; pengembangan prodi; pengembangan akreditasi internasional; pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kontribusi pada level nasional dan internasional; dan pengembangan kampus digital.
- 3) Tahapan ketiga (2024) adalah tahap pengembangan kampus sebagai *research & entrepreneur campus*.

f. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Dalam upaya mewujudkan misi Poltekpar Bali khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat, berikut adalah beberapa strategi yang perlu diimplementasikan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Meningkatkan pengakuan industri dan pemerintah terhadap hasil-hasil penelitian
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM melalui pelatihan metodologi penelitian, lokakarya penyusunan proposal, pembimbingan proses penelitian
- 3) Meningkatkan motivasi dan kompetensi peneliti guna meningkatkan budaya ilmiah dengan memberikan kesempatan dan kemudahan dalam proses penelitian dan menyediakan dana penelitian;
- 4) Mengembangkan kemitraan dengan lembaga terkait baik nasional maupun internasional melalui kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi sejenis, asosiasi profesi, dan masyarakat
- 5) Meningkatkan desiminasi dan publikasi hasil-hasil penelitian melalui seminar dan publikasi ilmiah
- 6) Menyusun *road map* penelitian dan PkM
- 7) Meningkatkan penerapan hasil penelitian di industri dan masyarakat
- 8) Memaksimalkan pemanfaatan TIK untuk penelitian dan PkM, dengan menyediakan sumber-sumber penelitian dan PkM berbasis IT yang dapat diakses secara cepat dan luas.

g. Penjaminan Mutu

- 1) Tahapan pertama (2020-2021) adalah tahapan awal implementasi dan perbaikan sistem penjaminan mutu yang mengacu pada Akreditasi BAN-PT, SNPT, reformasi birokrasi, ISO 9001:2008 dan TedQual serta ASEAN University Network (AUN) dimana semua satuan kerja melaksanakan standar yang sudah ditetapkan.
- 2) Tahapan kedua (2022-2023) adalah tahapan pematangan implementasi dan perbaikan sistem penjaminan mutu yang mengacu pada Akreditasi BAN-PT, SNPT, reformasi birokrasi, ISO 9001:2008 dan TedQual serta ASEAN University Network (AUN) dimana semua satuan kerja sudah mengembangkan standar yang ada.
- 3) Tahapan ketiga (2024) adalah tahap pengembangan sistem manajemen mutu yang menciptakan keunggulan Poltekpar Bali pada level nasional dan internasional.

### 13.SASARAN, INDIKATOR KETERCAPAIAN, DAN PROGRAM KERJA

Sasaran, indikator ketercapaian dan program kerja dituangkan dalam bentuk tabel:

No	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE	TAHUN PENCAPAIAN/KUANTITAS 2020 – 2024				
				I	II	III	IV	V
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>A.</b>	<b>Pendidikan</b>							
1	Pembentukan Prodi							
	S2 Terapan Hospitaliti	Jumlah Prodi	N/A					1
	S2 Terapan Pariwisata	Jumlah Prodi	1	1				
2	Pembentukan kelas internasional bid.Hospitaliti	Jumlah kelas	N/A		1			
3	<i>Acceptance rate</i> mahasiswa baru	%	42%	38	34	30	29	28
4	Penerimaan Mahasiswa							
	• S2 Terapan (1)	Jumlah mhs	N/A	20	20	20	20	30
	• S1 (2)		90 (3 kls)					
	• DIV (5)		240 (11 kls)	330	330	330	330	330
	• DIII (4)		330 (11 kls)	330	330	330	330	330
5	Mahasiswa lulus tepat waktu							
	S1	%	34,28	70	75	80	85	0
	DIV	%	40	50	55	60	65	70
	DIII	%	50	60	65	70	75	80
6	Rerata IPK Mahasiswa							
	• S2	Skala 1-4	N/A				3,30	3,40
	• S1		2,75	3.10	3.10	3.20	3.30	3.40
	• DIV		2,75	3.10	3.10	3.20	3.20	3.30



		• DIII		2,75	3.10	3.10	3.20	3.20	3.30
7		Mahasiswa DO	%	12	10	8	6	5,5	5,0
8		Indeks kepuasan mahasiswa	Skala 1-4	3,4	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70
9		Indeks kepuasan dosen& tenaga kependidikan	Skala 1-4	3,4	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70
10		Indeks kepuasan pengguna (PKN)	Skala 1-4	3,4	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70
11		Masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama	bulan	<3	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
12		Kinerja dosen dalam LBKD	SKS	12	12	12	12	12	12
13		Jumlah dosen	Orang	98	98	103	108	113	118
14		Rasio Mhs thd Dosen (RMD)	Rasio	01:23	01:23	01:22	01:21	01:20	01:20
15		Kualifikasi Dosen	orang						
		Latar belakang pendidikan							
		• S3		7	9	12	14	14	14
		• S2		98	98	103	108	113	118
		Jabatan akademik							
		• Guru Besar				1	2	3	4
		• Lektor Kepala		46	48	50	50	50	58
		• Lektor		45	43	43	45	53	50
		• Asisten Ahli		7	7	10	13	10	10
		Assesor							
		• Asesor kompetensi		40	40	45	50	55	60
		• Asesor LSU		10	15	20	25	30	35
		• Asesor BAN-PT		N/A	2	4	5	6	7
		Sertifikasi profesi							
		• Tersertifikasi Pendidik			90	95	100	105	110
• Tersertifikasi CHA, CEH, CFBM, CFOM, CHT, CHE, dll	98	103	108	113	116	116			

	16	Kualifikasi staf akademik (struktural dan JFU), laboran dan tenaga pustakawan							
		• S2	orang	N/A	1	1	1	1	1
		• S1		4	3	6	8	10	12
		• SMA		6	16	13	11	9	7
	17	Minimal Skor Toefl/IELTS dosen	Nilai	350	350	375	400	425	450
	18	Minimal Skor Toefl/IELTS mahasiswa sebelum ujian TA	Nilai	350	N/A	350	350	400	400
	19	Kehadiran dosen di kelas	%	85	88	90	92	94	96
	20	Kehadiran mahasiswa di kelas	%	80	85	90	92	94	96
	21	Jumlah dosen tamu	Orang	20	30	40	50	60	70
		Jumlah visiting Professor	Orang	2	4	6	8	10	12
	22	Perangkat pembelajaran	% dari jumlah MK						
		• Silabus		100	100	100	100	100	100
		• RPP		50	60	80	100	100	100
		• Buku Ajar		30	50	60	80	90	100
		• Modul Praktik		30	50	70	80	90	100
		• Validasi instrumen ujian (UAS/UTS)		60	100	100	100	100	100
		• Sistem informasi E-Learning		10	20	25	35	40	50
	23	Sarana pembelajaran	unit						
		• LCD projector		100	100	100	100	100	100
		• E-recording (PC di semua kelas)		N/A	50	50	50	50	50
		• Sistem informasi Hotel		1	1	1	1	1	1
		• Sistem informasi Travel Agent		N/A	1	1	1	1	1
		• Sistem informasi Kepariwisata		N/A	1	1	1	1	1
	24	Jumlah koleksi buku di perpustakaan	buku	3000	3500	4000	4500	5000	5500
	25	Jumlah koleksi jurnal ilmiah di	jurnal	N/A	5	10	20	25	30

		perpustakaan							
	26	Jumlah koleksi prosiding di perpustakaan	prosiding	N/A	1	2	3	5	7
	27	Prestasi mahasiswa dalam uji keterampilan	Penghargaan						
		Nasional		5	8	10	12	14	16
		Internasional		2	3	5	7	8	10
	28	Jumlah kegiatan <i>non-credit program</i>	Orang						
		• Certified GM		N/A	0	5	7	9	11
		• Certified FOM, EHK, FBM, dll		N/A	0	10	15	25	40
		• Certified KADIS PAR, dll		N/A	0	5	10	15	30
	29	Sertifikasi kompetensi mahasiswa	Sertifikat	2500	3000	4000	5000	6000	8000
	30	Daya serap lulusan	%	85	85	85	86	88	90
<b>B.</b>	<b>Bidang Penelitian</b>		Jumlah pertahun						
	1	Jumlah penelitian per dosen (penulis utama)	Penelitian/dosen	1	1	2	2	3	3
	2	Jumlah artikel dosen pada jurnal ilmiah tidak terakreditasi	Artikel	32	32	40	40	40	40
	3	Jumlah artikel dosen pada jurnal ilmiah terakreditasi	Artikel	5	5	10	15	20	25
	4	Jumlah artikel dosen pada jurnal ilmiah internasional terakreditasi	Artikel	1	2	4	6	8	10
	5	Jumlah dosen sebagai pembicara pada seminar nasional	orang	10	10	15	20	25	30
	6	Jumlah dosen sebagai pembicara pada seminar internasional	orang	5	5	10	15	20	20
	7	Jumlah penelitian yang digunakan oleh industri/pemerintah/masyarakat	Penelitian	10	2	5	10	15	20
	8	Jumlah hibah penelitian yang diterima oleh dosen	Penelitian hibah	N/A	0	0	2	4	6

	9	Jumlah dosen mengikuti seminar/lokakarya	orang	20	15	20	25	30	40
	10	Jumlah <i>joint research</i> dosen dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa</li> <li>• Dosen lain PT Dalam Negeri</li> <li>• Dosen lain PT Luar Negeri</li> </ul>	Penelitian	5	2	5	8	10	15
	11	Prestasi dosen dalam bidang penelitian pada ajang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasional</li> <li>• Internasional</li> </ul>	Prestasi penelitian	5	1	5	7	10	10
	12	Prestasi mahasiswa dalam bidang penelitian pada ajang: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasional</li> <li>• Internasional</li> </ul>	Prestasi	3	3	5	5	7	7
	13	Jumlah buku teks (terbitan nasional)	Buku	3	5	6	8	10	12
<b>C.</b>	<b>Bidang Pengabdian pada Masyarakat</b>		Jumlah per tahun						
	1	Pengabdian per dosen	Orang	2	2	2	2	2	2
	2	Pendampingan desa wisata	Pendampingan	12	12	12	12	12	12
	3	Pendampingan DTW	Pendampingan	2	2	4	4	4	4
	4	Jumlah dosen sebagai pengurus/anggota asosiasi profesi	Orang	10	10	12	14	16	20
	5	Jumlah dosen sebagai konsultan pemerintah	orang	2	2	4	6	8	10
	6	Jumlah dosen sebagai konsultan industri pariwisata	orang	5	5	7	9	11	15
<b>D.</b>	<b>Bidang Penjaminan Mutu</b>								
	1	Akreditasi AUN							
	2	Akreditasi BAN-PT PRODI <ul style="list-style-type: none"> <li>• S2</li> </ul>	Akreditasi A	70%	70%	70%	70%	80%	80%

		<ul style="list-style-type: none"> <li>S1</li> </ul>														
		<ul style="list-style-type: none"> <li>DIV</li> </ul>														
		<ul style="list-style-type: none"> <li>DIII</li> </ul>														
	3	Akreditasi BAN-PT AIPT	Nilai	B	B	B	B	B	A							
	4	Akreditasi TedQual	tahun	2	3	3	3	4	4							
	5	Hasil surveillace ISO	% conformance	40	50	60	70	80	90							
		Audit internal	PDCA													
<b>E</b>	<b>Bidang Kemahasiswaan</b>															
	1	Ragam kegiatan olah raga	Kegiatan	10	10	11	12	13	13							
	2	Ragam kegiatan seni	Kegiatan	5	5	5	6	6	7							
	3	Ragam kegiatan budaya	Kegiatan	3	33	3	4	4	5							
	4	Ragam kegiatan vokasi	Kegiatan	5	5	5	6	6	7							
	5	Ragam kegiatan ilmiah	Kegiatan	3	3	4	4	5	5							
	6	Ragam kegiatan minat khusus	Kegiatan	3	3	5	5	7	7							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Donor darah, bakti sosial, dll</li> </ul>														
	7	Kesejahteraan mahasiswa	orang													
										<ul style="list-style-type: none"> <li>Beasiswa</li> </ul>	75	80	85	90	95	100
										<ul style="list-style-type: none"> <li>Asrama</li> </ul>	N/A	2	2	2	2	2
	8	Ragam kegiatan kewirausahaan (inkubator bisnis)	Kegiatan		N/A	0	1	1	2	2						
	9	Ragam kegiatan <i>soft skill</i> (kepemimpinan, organisasi, pembentukan karakter, dll)	Kegiatan	1	1	2	2	3	3							
<b>F</b>	<b>Bidang Kerjasama dan Alumni</b>															
	1	Kerjasama dengan PT	MOU													
										<ul style="list-style-type: none"> <li>Nasional</li> </ul>	6	6	7	8	9	10
										<ul style="list-style-type: none"> <li>Internasional</li> </ul>	6	6	6	6	6	6
	2	Kerjasama dengan industri	MOU													

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nasional</li> <li>Internasional</li> </ul>		20	20	22	24	26	28
				4	4	4	6	6	8
	3	Kerjasama dengan asosiasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Nasional</li> <li>Internasional</li> </ul>	MOU						
				8	8	8	8	10	10
				3	3	3	3	4	4
	4	Kerjasama dengan pemerintah/lembaga <ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian</li> <li>Provinsi</li> <li>Kabupaten</li> </ul>	MOU						
				2	2	2	2	3	3
				4	4	4	4	5	5
				9	9	9	10	10	10
	5	Kelembagaan alumni	Lembaga	1	1	1	1	1	1
	6	Database alumni	1.000 Orang	7	8	9	9,7	10,4	11,1
	7	Kontribusi alumni <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesejahteraan (beasiswa, peluang kerja,)</li> <li>Pengembangan tridharma (Guest Lecture, orientasi, penelitian, PkM,</li> <li>Kurikulum, bahan ajar, PKN)</li> <li>Sumbangan fasilitas</li> </ul>	Jumlah kegiatan	5	5	7	9	11	13
<b>G</b>	<b>Bidang Tata Kelola</b>								
	1	Peningkatan ketersediaan kebijakan, manual, standar, SOP dan formulir sesuai dengan proses bisnis yang ada	% dokumen kebijakan, manual, standar, SOP dan formulir	40%	55	75	95	100	100
	2	Peningkatan serapan anggaran DIPA	% serapan	92	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
	3	Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan	Jumlah temuan	12	12	6	2	0	0
	4	Efektivitas penggunaan ruangan	% penggunaan	N/A	70	80	90	100	100

5	Penguatan akuntabilitas pengelolaan BMN	% pencatatan dan kebenaran BMN	86	86	89	92	95	98
6	Peningkatan kualitas informasi jabatan berdasarkan Anjab dan ABK	% ketersediaan informasi jabatan berkualitas	65	80	90	100	100	100
7	Peningkatan kompetensi pegawai	Jumlah pelatihan per pegawai	N/A	1	1	2	2	3
8	Peningkatan capaian kinerja pegawai	% capaian kinerja	75	85	95	100	100	100
9	Peningkatan keamanan kampus	Jumlah kehilangan	5	5	4	3	2	2
10	Peningkatan keselamatan kerja	Jumlah kecelakaan kerja	N/A	5	4	3	2	2
11	Peningkatan kepuasan pegawai	% kepuasan	N/A	75	80	85	95	96
12	Penigkatan kawasan tanpa rokok	% area kampus	90	99	99	99	99	99
13	Penigkatan kebersihan dan keteraturan Kampus dengan program Kaizen 5S	% capaian kinerja	N/A	75	80	85	90	95
14	Peningkatan kapasitas E-Office	% capaian kinerja	N/A	50	60	70	80	90



Direktur Politeknik Pariwisata Bali

**Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes.**

NIP. 19641026 199003 1 001